

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN MELALUI BELANJA
MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

**I Gusti Agung Ayu Prami Saraswati¹
Sudarsana Arka²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: pramisaraswati@yahoo.co.id/ tlp. 082236366936

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh langsung dan tidak langsung antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung serta uji sobel untuk mengetahui pengaruh tidak langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Melalui belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis menunjukan belanja modal merupakan variabel intervening dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, tingkat kemiskinan.

ABSTRACT

This study aimed to determine the direct and indirect influence of the local revenue and general allocation fund against poverty with capital expenditure as an intervening variable. This research was conducted in all districts / municipalities in Bali Province. The data collection is done through the documents contained in the BPS Bali. The data used in this research is secondary data, while the analysis method used is the analysis of lane or path analysis to determine the effect, directly and Sobel test to determine the effect indirectly. The analysis showed that the local revenue and general allocation have significant positive effect on capital spending. Local revenue and general allocation have significant negative effect on poverty levels and capital expenditures have significant negative effect on poverty levels. Through capital expenditure, the local revenue and general allocation have significant indirect effect on poverty levels. The analysis show that an intervening variable capital expenditure of local revenue and general allocation fund.

Keywords: local revenue, general allocation fund, capital expenditures, the level of poverty.

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan pembangunan dasawarsa ini adalah usaha untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena selain alasan kemanusiaan, mengatasi masalah kemiskinan merupakan usaha untuk menghindari biaya pembangunan yang lebih besar di masa yang akan datang. Di Indonesia, kebijakan mengatasi permasalahan kemiskinan juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin tidak berkurang. Ini membuktikan bahwa dalam pengelolaan pendapatan masih terjadi kesenjangan pengalokasian sumber - sumber yang memberikan kontribusi pada pembangunan sehingga hasil pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan kemakmuran yang merata. Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan dan mengelola pendapatannya sendiri, maka akan terjadi peningkatan pada berbagai potensi di sektor masing-masing yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian daerah tersebut akan menekan tingkat pengangguran di daerahnya dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di daerah.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan bahan pokok di berbagai kebutuhan hidup (Panji, 2016). Istilah kemiskinan terkait dengan : (1) Penggambaran kebutuhan material termasuk kekurangan bahan pokok dan pelayanan, dan (2) Keadaan ekonomi dimana kekurangan kekayaan (biasanya dianggap sebagai modal, uang, barang material, atau sumber daya). Kemiskinan juga merupakan bentuk ketidakmampuan terhadap pihak penguasa sehingga mereka masuk pihak dalam

kategori yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa, terancam dan tereksplotasi dan juga kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat (Mubyarto, 2002).

Todaro dan Smith (2003) mendeskripsikan kaum miskin sebagai berikut : mereka ini berjumlah lebih dari tiga perempat dari total penduduk dunia yang kini hampir mencapai 6 milyar jiwa, nasibnya jauh kurang beruntung karena sehari – harinya harus hidup dalam kondisi serba kekurangan. Mereka tidak memiliki rumah sendiri, dan walaupun punya ukurannya begitu kecil. Persediaan makanan yang ada juga acapkali tidak memadai. Kondisi kesehatan mereka pada umumnya tidak begitu baik ataupun buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta menganggur (Suputra, 2016). Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berakar pada berbagai sektor dan kondisi (Panji, 2016).

Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan (Astrini, 2013). Keterbatasan modal, kurangnya keterampilan dan pengetahuan menyebabkan masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sempit untuk mengembangkan usaha. Pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, yang merupakan masalah pokok yang hingga kini belum teratasi dengan tuntas.

Masalah pokok yang diperhatikan dalam mengukur pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu 1) Apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan, 2) Apa

yang terjadi terhadap pengangguran, 3) Apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat bahwa pada hakekatnya di negara-negara berkembang terdapat kemiskinan yang sangat serius dan masalah ini bertambah menjadi sangat serius lagi sebagai akibat ketidakpastian perekonomian (Anis Setiyawati, 2007).

Desentralisasi memainkan peran dalam strategi dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan memberikan tanggung jawab pengeluaran ke tingkat pemerintahan (Sudewi, 2013). Kebijakan pertumbuhan perlu dilengkapi dengan intervensi khusus dalam mendukung orang miskin, sementara stabilitas makroekonomi dan politik dan pemerintahan yang baik dianggap sebagai prasyarat untuk pengentasan kemiskinan (Steiner,2005). Bagi masyarakat miskin, pemenuhan hak dasar atas pekerja yang layak ditentukan dari ketersediaan lapangan kerja yang dapat diakses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, serta melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Ashcroft dan David, 2008).

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat, bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah. Beberapa strategi rancangan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali Tahun

2013-2018, adalah sebagai berikut: mengendalikan tingginya pertumbuhan penduduk dan ketimpangan antar kabupaten/kota, mempercepat perbaikan sistem dan akses pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Berdasarkan rumusan RPJMD tersebut, kemiskinan tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali. Langkah mendasar strategi ini adalah bagaimana penurunan penduduk miskin dapat terus dipercepat.

Salah satu isu strategis penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif, yang mencakup pembangunan infrastruktur pedesaan serta pengembangan usaha ekonomi produktif di pedesaan, menjadi salah satu program Inti dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Gerbang Sadu Mandara (GSM) merupakan program/kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Bali.

Berdasarkan Tabel 1, Provinsi Bali terkait tingkat kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum cenderung berfluktuasi, dimana dari tahun 2010 sampai tahun 2012 terjadi penurunan dan tahun 2013 terjadi peningkatan. Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak (8,11 persen) pada tahun 2010 ini disebabkan oleh Kabupaten Jembrana

di dominasi oleh sektor pertanian dimana penduduk di Kabupaten Jembrana sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yang penghasilannya relatif rendah, selanjutnya Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. Penduduk Miskin di Provinsi Bali menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2009 – 2013

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jembrana	6,80	8,11	6,56	5,74	5,56
Tabanan	4,99	6,96	5,62	4,90	5,21
Badung	3,28	3,23	2,62	2,16	2,46
Gianyar	5,76	6,68	5,40	4,69	4,27
Bangli	5,18	6,41	5,16	4,52	7,01
Klungkung	5,23	7,58	6,10	5,37	5,45
Karangasem	6,37	7,95	6,43	5,63	6,88
Buleleng	5,95	7,35	5,93	5,19	6,31
Denpasar	2,20	2,22	1,79	1,52	2,07
Provinsi Bali	4,88	5,67	4,59	3,95	4,49

Sumber : BPS Provinsi, 2016 (Data diolah)

Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin yang terendah adalah Kota Denpasar (1,52 persen) pada tahun 2012, kemudian disusul Kabupaten Badung (2,16 persen) pada tahun 2012, ini dikarenakan Kabupaten Badung memiliki pariwisata yang menghasilkan pendapatan lebih banyak sehingga mampu menunjang atau memberikan peluang kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan persentase jumlah kemiskinan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Keputusan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah mulai memperlihatkan hasil, walaupun belum mampu mengatasi seluruh masalah kemiskinan. Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang memiliki 9

Kabupaten/Kota, akan tetapi pemerataan pembangunan masih belum terjadi di setiap Kabupaten/Kota di Bali maka masih banyak ketimpangan yang perlu diperbaiki.

Belanja modal merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kemiskinan. Usaha yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengentasan kemiskinan tersebut dapat dilihat dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran belanja modal. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat.

Era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal

adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan di beberapa negara, dalam mencapai tujuannya guna meningkatkan pembangunan manusia terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya pemerataan distribusi, pengalokasian anggaran secara tepat dan memadai dalam aspek pendidikan dan kesehatan (Wijayanti, 2015).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian, sehingga dengan semakin tingginya produktivitas perekonomian maka dapat mewujudkan pembangunan di setiap daerah dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Belanja modal merupakan suatu investasi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Belanja modal dipengaruhi antara lain yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Penciptaan kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari

APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Sebelumnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengeluaran transfer ke daerah berupa subsidi daerah otonom dan anggaran bantuan pembangunan pusat.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD-nya, sehingga porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah seharusnya juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Iswara, 2014). Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru. Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing - masing, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah (David dan Prio, 2007).

Sumber pembiayaan utama atau dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mestinya berasal dari kemandirian daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi, Kuncoro (2004) menemukan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer Dana

Perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum berperan untuk pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (Swandewi, 2014).

Pengalokasian Dana Alokasi Umum pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota diperuntukan untuk pemerataan kemampuan keuangan dalam mendanai setiap kebutuhan daerah kabupaten/kota di provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan DAU juga perlu memperhatikan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme pengelolaan yang tepat dan transparan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, dikelola berdasarkan pendekatan kinerja yaitu pengelolaan anggaran yang mengutamakan pencapaian dari alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan (Meilen,dkk 2014).

Berdasarkan dari latar belakang, sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. (a) Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali? (b) Bagaimanakah pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali? (c) Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali? (d) Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali?

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah. (a) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (b) Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (c) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (d) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu. (a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali (b) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali (c) Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali (d) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali (e) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali (f) Pendapatan Asli Daerah dan Dana

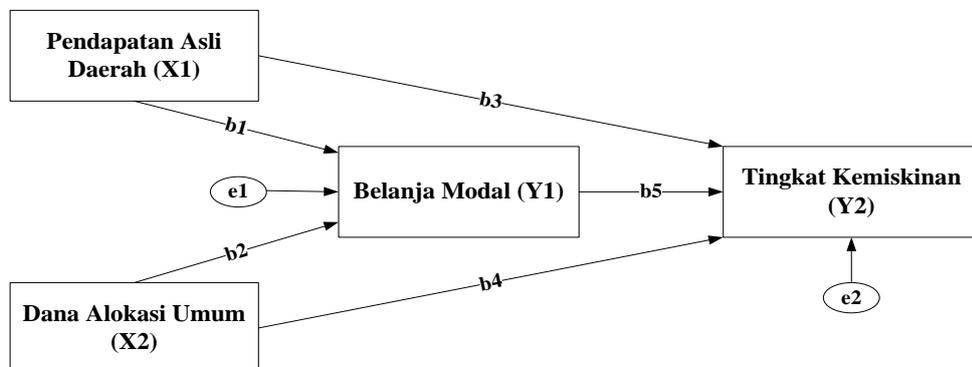
Alokasi Umum berpengaruh tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi dari penelitian ini adalah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Data yang dikumpulkan melalui metode observasi non partisipan dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat serta mempelajari uraian – uraian dari buku – buku, jurnal – jurnal, skripsi, dan mengakses data dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel *exogenous* terhadap variabel *endogenous*. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menaksir kausalitas antar variabel berdasarkan teori (Suyana Utama, 2009:135).

Gambar 1
Model Analisis Jalur



Berdasarkan Gambar 1, didapat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel, yaitu:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Alokasi Umum

Y₁ = Belanja Modal

Y₂ = Tingkat Kemiskinan

e₁,e₂ = Nilai kekeliruan taksiran standar

b₁,b₂,b₃,b₄,b₅ = Koefisien jalur masing-masing variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (a) pengujian pengaruh langsung, yakni menguji pengaruh langsung pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, pengaruh langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan serta (b) Pengaruh tidak langsung variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan melalui variabel belanja modal, yang diuji dengan menggunakan uji Sobel. Hasil pengujian persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antar Variabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	t. hitung	P. Value	Keterangan
X1 → Y1	0,715	0,003	6,382	0,000	Signifikan
X2 → Y1	0,270	0,059	2,409	0,020	Signifikan
X1 → Y2	0,740	0,000	-14,527	0,000	Signifikan
X2 → Y2	0,092	0,004	-2,369	0,023	Signifikan
Y1 → Y2	-0,323	0,010	-6,459	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel PAD terhadap belanja modal sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Sejalan dengan tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah sangat diharapkan memiliki sumber kemandirian fiskal yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja dalam pengelolaan APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Sulistyowati (2011) dan Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2011) memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Menurut Mardiasmo (2002) peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah (Putro, 2010). Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran Pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, tetapi penerimaan daerah dari unsur

PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswanto (2011) bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Pungky Ardhani (2011) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada alokasi anggaran belanja modal.

Penelitian oleh Brata (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak pihak, khususnya dunia usaha, yang mengeluhkan soal begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang justru menekan daya saing daerah.

Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh Candra Gunantara dan A.A.N.B Dwirandra (2014). Keduanya menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya PAD, daerah menjadi lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal. Selanjutnya

ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya produktivitas.

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel DAU terhadap belanja modal sebesar $0,020 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengalokasian DAU sejatinya bertujuan agar disparitas kapasitas fiskal keuangan antardaerah lebih merata, sehingga konsep DAU yang dijalankan adalah konsep DAU sebagai *equalization grant*. Penelitian yang dilakukan oleh Putro (2010) dan Diah Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh pada Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2010).

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik (Putro, 2010).

Dari penelitian yang telah dilakukan, dengan hasil yang diperoleh bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif signifikan pada variabel belanja modal (Sheila, 2012). Variabel DAU berpengaruh signifikan pada belanja modal ini disebabkan mungkin karena sebagian besar kabupaten/kota

di Jawa Tengah mengandalkan DAU yang nilainya cukup besar untuk membiayai semua pembiayaan dan belanja daerah terutama belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) maupun Pungky Ardhani (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel PAD terhadap tingkat kemiskinan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain PAD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Adanya hubungan negatif antara variabel pendapatan asli daerah dengan tingkat kemiskinan. Untuk mengoptimalkan dan mengelola PAD yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan, maka diperlukan pengelolaan anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan / ketimpangan regional (Kuncoro, 2003). Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan. Pertumbuhan

ekonomi akan menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah.

Menurut hipotesis Kuznet, dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Dasar dari hipotesis Kuznet adalah ketimpangan yang rendah yang terjadi dipedesaan dengan sektor yang mendominasi adalah pertanian dibandingkan dengan perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa dan industri yang tingkat ketimpangan pendapatannya tinggi. Kuznet mengatakan, terjadi transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa. Semakin rendah kesenjangan pendapatan suatu daerah mengindikasikan rendahnya tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel DAU terhadap tingkat kemiskinan sebesar $0,023 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Adanya hubungan negatif antara variabel dana alokasi umum dengan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini, seperti halnya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dalam pengalokasiannya lebih diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan daerah lainnya. Dengan kata lain, dana alokasi umum secara langsung belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilen Greri Paseki, dkk yang berjudul pengaruh dana alokasi umum dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan

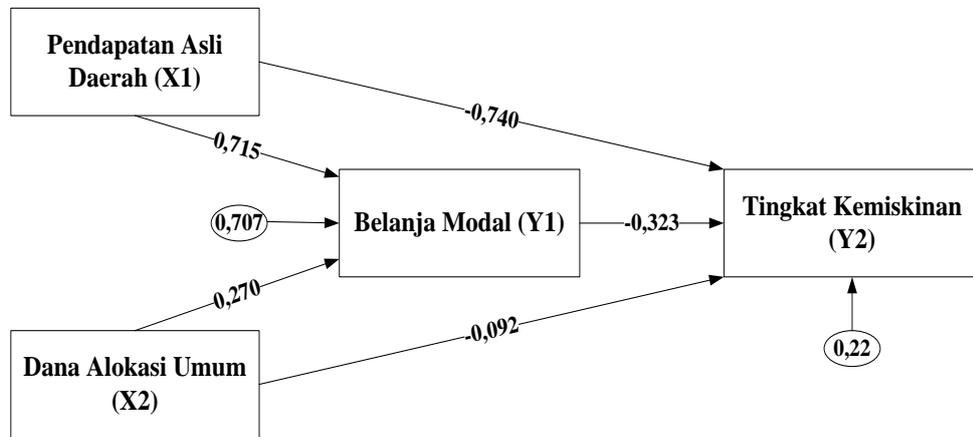
dampaknya terhadap kemiskinan di Kota Manado tahun 2004-2012 hasil analisis menunjukkan dana alokasi umum secara langsung memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Manado.

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel belanja modal terhadap tingkat kemiskinan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain belanja modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Adanya hubungan negatif antara variabel belanja modal terhadap tingkat kemiskinan dalam penelitian ini, karena sesuai dengan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang meningkat, membuat belanja modal ikut meningkat sehingga meningkatnya belanja modal tersebut berimbas pada menurunnya tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Adi (2012) yang memperoleh hasil bahwa rasio belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan di kota/kabupaten Jawa Timur. Pengaruh signifikan negatif dari belanja modal daerah terhadap tingkat kemiskinan juga berbanding lurus dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave, berdasarkan pandangan mereka melalui pengamatan terhadap tahap-tahap pembangunan ekonomi di beberapa negara. Dengan terbukti adanya pengaruh signifikan negatif dari belanja modal terhadap kemiskinan pada penelitian ini, maka jelas bahwa belanja modal daerah sendiri terbukti konsisten dengan teori yang ada dan berperan penting sebagai lokomotif percepatan dan akselerasi pembangunan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap provinsi.

Gambar 2
Diagram Hasil Analisis Jalur



Sumber: Tabel 2

Pengujian pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja modal dilihat melalui nilai z.

Tabel 3
Hasil Ringkasan Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Antarvariabel	Variabel Mediasi	Sab	Z	Keterangan
X1 → Y2	Y1	0,0063	-36,5079	Signifikan
X2 → Y2	Y1	0,0185	-4,702	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3, secara absolut Z hitung $-36,5079 > 1,64$. Artinya belanja modal (Y_1) merupakan variabel intervening pengaruh pendapatan asli daerah (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja modal.

Berdasarkan Tabel 3, secara absolut Z hitung $-4,702 > 1,64$. Artinya belanja modal (Y_1) merupakan variabel intervening pengaruh dana alokasi umum

(X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain dana alokasi umum berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya maka, dapat ditarik simpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut. (a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (b) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (c) Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (d) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (e) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (f) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali Periode 2009 – 2013.

Dari pembahasan dan simpulan yang telah disampaikan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. (a) Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, serta sebaiknya dapat

memaksimalkan pengelolaan keuangan sehingga potensi perekonomian yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dimaksimalkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, (b) Pemerintah daerah sebaiknya berfokus pada penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kembali program – program penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Pemerintah daerah harus mampu mengevaluasi kembali pemberian dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah agar sesuai dengan yang membutuhkan, (c) Untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan variabel-variabel bebas lainnya yang memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anis Setiyawati Dan Ardi Hamzah. 2007. Analisa PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2005). *Jurnal*. Universitas Trujoyo.
- Ashcroft, Vincent dan David Cavanaugh. 2008. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), pp: 335-363.
- Astrini, Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), pp: 384-392.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Bali Dalam Angka Tahun 2013*. Bali.
- , 2014. *Bali Dalam Angka Tahun 2014*. Bali.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Candra Gunantara, Putu dan A.A.N.B Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan

Pengaruh ...[I Gusti Agung Ayu Prami Saraswati, Sudarsana Arka]

Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *Jurnal Jurusan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin. Makassar.

David Harianto dan Prio Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Diah Sulistyowati. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Kota Bali). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Iswara, I Made Anom Dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2006 – 2011. *E-Jurnal EP Unud*, 3(11), h: 492-501.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

----- . 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Yogyakarta : Erlangga.

Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Jurnal*. Universitas Indonesia.

Kuznets, Simon. 1955. "Economic Growth and Income Inequality". *The American Economic Review*, Volume XLV March, 1955 Number One.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Meilen Gleri Paseki, Amran Naukoko dan Patrick Wauran. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Volume 14 No. 3.

Mubyarto. 2002. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Artikel Tahun I No. 7, November 2002, Jakarta.

- Musgrave, Richard. 1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*, New York : McGraw.
- Nugroho Adi Wiyoso. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Rovinsi Jawa Timur. *Skripsi* tidak diterbitkan. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Panji, I Putu Barat dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5(3), h: 316 – 337.
- Pungky Ardhani. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purba, Yofa Selvida Theresia dan Luh Putu Aswitari. 2016. Pengaruh Peran Sektor Non-Pertanian, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud*, 5(7), h : 799-824.
- Putri, I. A. P. Septyana Mega dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2013. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(10), pp: 441-448.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”. *Skripsi Dipublikasikan*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sheila Ardhian Nuarisa. 2012. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Steiner, Susan. 2005. *Decentralisation And Poverty Reduction: A Conceptual Framework For The Economic Impact*. Working Papers. German Overseas Institute. GOI-WP-03/2005.
- Sudewi, Ni Nyoman Ayu dan I. G. A, Putu Wirathi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(3).

Pengaruh ...[I Gusti Agung Ayu Prami Saraswati, Sudarsana Arka]

Suputra, I Putu Eka dan Ni Putu Martini Dewi. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(2), h: 105 – 112.

Suyana Utama, Made. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Edisi Ke 3. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Swandewi, Anak Agung Istri Agung. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Universitas Udayana*. 3(7), pp: 356-376.

Todaro, Michael P dan Stephen C Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ke 8. Jakarta: Erlangga.

Wijayanti , Ni Kadek HERNI dan Ida Bagus Darsana. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal EP Unud*, 4(3), h: 1164-1193.